

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Zulfikar Bayu Giri^{*1}, Lailah Fujianti², Khalida Utami³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia

Email : ZulfikarBayuGiri@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menguji pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada KEMENTERIAN KESEHATAN dengan menggunakan komponen pengendalian internal dari *Committe Of Sponsoring Organization of the treadway Commision* (COSO). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis data yang dilakukan berupa perbandingan fakta yang ada didalam perusahaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan serta teori yang berlaku umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang berupa wawancara langsung dengan pihak dari KEMENTERIAN KESEHATAN, melakukan dokumentasi serta mengamati dokumen ataupun catatan-catatan yang ada pada KEMENTERIAN KESEHATAN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada KEMENTERIAN KESEHATAN sudah sesuai dengan komponen pengendalian internal *Committe Of Sponsoring Organization of the treadway Commision* (COSO) dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

Kata kunci : Pengendalian internal, penerimaan dan pengeluaran kas, *Committe Of Sponsoring Organization of the treatway Commision* (COSO)

ABSTRACT: *This research aims to determine and test the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for internal control over cash receipts and disbursements at the MINISTRY OF HEALTH using internal control components from the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). The type of research used is qualitative research with descriptive methods. Data analysis is carried out in the form of a comparison of existing facts within the company with Standard Operating Procedures (SOP) that have been determined by the Ministry of Finance as well as generally accepted theories. The data collection techniques used were library research, field research in the form of direct interviews with parties from the MINISTRY OF HEALTH, carrying out documentation and observing documents or records at the MINISTRY OF HEALTH. The results of this research show that internal control over cash receipts and disbursements at the MINISTRY OF HEALTH is in accordance with the internal control components of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and standard operating procedures (SOP) that have been determined by the Ministry of Finance*

Keywords: *Internal control, cash receipts and disbursements, Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission (COSO)*

PENDAHULUAN

Kementerian Kesehatan ialah suatu kegiatan yang bergerak dalam bidang kesehatan harus mempunyai tujuan dan visi – misi yang harus di capai. Tujuan dari kementerian kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, penguatan pelayanan kesehatan dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat sekaligus peningkatan sumber daya kesehatan.

Berbagai kasus yang sering terjadi mengenai kecurangan Lapping dan kitting kembali menjadi perhatian di dunia pemerintahan untuk itu di butuhkan peran dari pengendalian internal. Lapping jenis penggelapan yang dilakukan pada suatu oknum yang berada di kementerian dengan cara menunda pembukuan atas penagihan rekening tagihan untuk menyembunyikan kecurangan terhadap uang tunai di kementerian, kasus ini dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang menerima kas dan menyelenggarakan buku piutang. Kitting yaitu salah satu bentuk penyelewengan penerimaan kas yang dilakukan oleh oknum pegawai di suatu kementerian dengan cara di sengaja dalam jangka waktu sementara maupun dalam jangka waktu yang lama. Contoh Lapping dalam praktek dunia nyata yaitu Kasus penggelapan yang dikutip dalam (Republik,2022) yaitu seorang karyawati yang bekerja di PT Sumber Batu. Pihaknya menerima laporan dari perusahaan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya. Pihak perusahaan mulanya curiga saat sedang melakukan audit keuangan tercatat adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemasukan dengan jumlah barang yang terjual, perusahaan mengalami kerugian sebesar 662 juta. Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Sumber Batu membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Maka dari itu perlunya sistem pengendalian internal di dalam kementerian sangatlah penting terhadap pengendalian internal terutama pada penerimaan dan pengeluaran kas. Karena kas mempunyai suatu peran yang sangat penting dan menunjang kelangsungan operasional suatu kementerian dan jika dalam kementerian penggelapan kas dalam jumlah yang besar, arus kas akan menjadi terganggu dan dapat mengganggu kelancaran operasional dalam suatu perusahaan. Peningkatan produktivitas kementerian juga di pengaruhi oleh manajemen kas yang baik dan kementerian juga harus selalu memastikan bahwa kas yang digunakan untuk kepentingan kementerian harus selalu efektif dan efisien.

Pengendalian internal merupakan bentuk cara atau Teknik pengawasan kegiatan yang berada di suatu kementerian dan di gunakan untuk mencegah tindak atau terjadinya jenis kecurangan atau jenis kesalahan yang bertujuan untuk melindungi keuangan kementerian terutama pada kas. Dalam Kementrian Pengelolaan kas sangat penting karena untuk memastikan tersedianya kas untuk membiayai kewajiban negara, adanya tindakan yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan imbalan – imbalan dari surplus kas atau untuk mengatasi kekurangan kas, penyediaan kas bagi semua kementrian/lembaga sesuai dengan proyeksi arus kas untuk membiayai berbagai kegiatan, dan pembayaran tepat waktu kepada para pemasok kementrian/lembaga sesuai dengan jadwal kegiatan mereka. Menurut (Agoes, 2016) kas merupakan aset lancar di dalam suatu perusahaan yang sangat menarik dan juga sangatlah mudah untuk diselewengkan.

Sistem dalam pengendalian internal dalam kementrian sangat dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Kas dalam penerapan di kementrian sangat penting karena kas merupakan aktiva paling likuid dan paling mudah untuk

disalah gunakan oleh oknum dalam suatu kementerian serta sangat mudah untuk di pindahkan tangankan oleh karena itu kas paling sering dijadikan sasaran untuk berbuat curang atau menjadi sasaran untuk oknum yang ingin berbuat curang di kementerian.

Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset dalam suatu perusahaan yang berupa penjualan tunai, pengumpulan piutang, dan sejenisnya. Penerimaan kas dalam suatu kementerian berasal dari Modul penerimaan negara yang memuat penerimaan serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyeteroran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara. Penerimaan kas bertujuan melindungi kas yang di terima dari penyelenggara pemerintahan seperti cek maupun surat pemberitahuan.

Pengeluaran kas adalah suatu kegiatan transaksi pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya aset dalam suatu kementerian yang menyebabkan kas dalam suatu kementerian berkurang akibat dari beberapa transaksi seperti pembayaran hutang, pembayaran kewajiban, pembelian peralatan kantor ataupun pembelian aset yang berguna untuk kementerian. Pada penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu kementerian kemungkinan dapat terjadi suatu penyelewengan yang dapat digunakan oleh para oknum yang ingin berbuat curang di kementerian tersebut maka dari itu pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mencegah segala bentuk kecurangan dan agar segala bentuk penerimaan dan pengeluaran kas dapat terkontrol serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) di dalam Suatu kementerian.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, **“Analisis Pengendalian internal Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Kementerian Kesehatan”**.

KAJIAN TEORI

1. *Grand Theory*

Stewardship yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis 1991 dalam (Afifah, 2018) menggambarkan dimana keadaan para manajemen tidak termotivasi oleh kepentingan individu melainkan manajemen fokus terhadap target utama yang berupa kepentingan bersama atau organisasi. Pada teori stewardship ditunjukkan mampu bertindak penuh tanggung jawab, memiliki integritas, berlaku jujur serta dapat dipercaya. Pada teori ini manajemen mempunyai sifat ingin memberikan kepuasan dan keberhasilan terhadap organisasi atau masyarakat individu dengan itu teori ini digunakan sebagai dasar penelitian terhadap pengendalian internal pada penerimaan dan pengeluaran kas.

2. **Pengertian Kas**

Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet)

Menurut PSAK No. 2 (IAI,2017), pengertian kas adalah harta perusahaan yang berfungsi sebagai alat tukar, artinya kas adalah suatu harta yang paling siap untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan menurut Pengertian kas menurut Martani (2014) dalam (Jannah, 2017) adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian kas di atas, dapat disimpulkan bahwa kas adalah merupakan aset yang paling liquid yang terdiri dari saldo kas yang di gunakan sebagai alat tukar menukar dan digunakan oleh kementrian untuk membayar kewajiban kementrian serta untuk melaksanakamn kegiatan kementrian.

3. Pengendalian Internal

a. COSO (Committee of Sponsoring Organizatios of the Treadway)

The Committee of Sponsoring Organization atau yang sering di singkat dengan COSO ini dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sering terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. COSO terdiri atas 5 komponen:

- 1) *Control environment* Tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen.
- 2) *Risk assessment* Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum
- 3) *Control activities* Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern.
- 4) *Information and communication* Tindakan untuk mencatat, memproses dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas.
- 5) Monitoring Penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Pengertian pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizatios of the Treadway*) sama dengan definisi yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan *American Institute Ceeritifed of Public Accountans* (AICPA), yaitu sama menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang drirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas kehandalan laporan keuangan, operasional yang efisien dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Hanya saja AICPA (*American Institute Ceeritifed of Public Accountaans*) menambahkan tujuannya dengan pengamanan asset. (Susanti D.L: 2016). Romney dan steinbart, 2015) menjelaskan bahwa pengendalian internal menjalankan tiga fungsi, yaitu:
 - a) Pengendalian preventif (*preventive control*), mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya, merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas asset dan informasi.
 - b) Pengendalian detektif (*detective control*), menemukan masalah yang tidak terelakkan. Contohnya, menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan.
 - c) Pengendalian korektif (*corrective control*), mengidentifikasi dan memperbaiki masalh serta memulikannya dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya, menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entri data, dan pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya.

b. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut PSAK No. 12 (2012) wewenang untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan, operasional dan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.

Sedangkan menurut Hery dalam (Kalendesang, Lambey, & Budiarmo, 2017) adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway*) (2013) dikutip dari (Fajar & Rusmana, 2018) mendefinisikan pengendalian internal adalah pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen dan personil lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam 10 pencapaian tujuan perusahaan baik terkait dengan operasi, pelaporan maupun kepatuhan. dan dalam rangka memberikan jaminan organisasi dapat mencapai tujuan yaitu melalui:

- 1) efisiensi dan efektifitas produksi.
- 2) penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Menurut beberapa dari penelitian yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat untuk mengawasi serta melindungi aset dan sumber daya Kementerian Kesehatan yang bertujuan agar terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan Kementerian Kesehatan maka dari itu dibutuhkan pengendalian internal untuk memantau apakah Kementerian Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

c. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Tuanakota (2015) dalam (Yuwanita & Ariani, 2016) tujuan dari pengendalian internal secara garis besar dapat dibagi ke dalam empat kelompok yaitu:

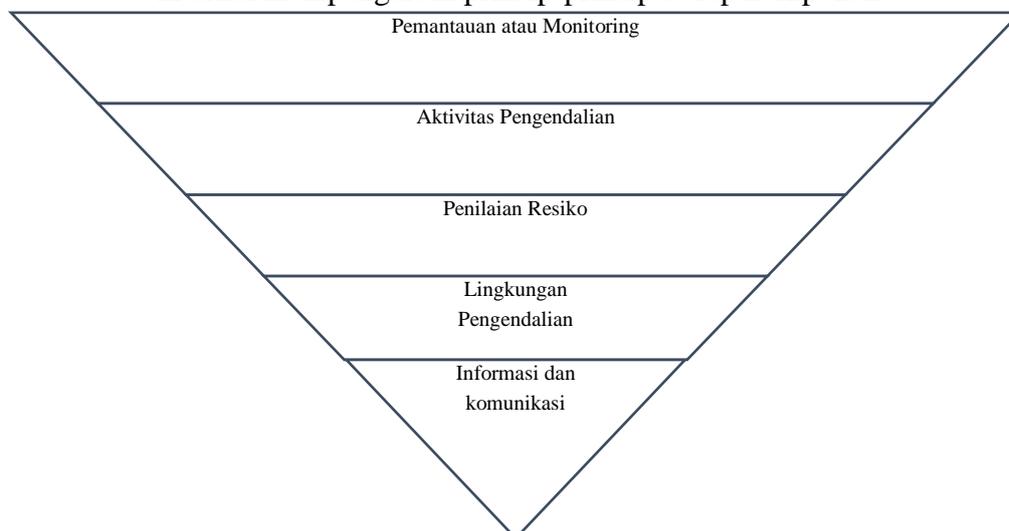
- 1) Tujuan strategis, dimana dengan saran-saran utama yang mendukung misi entitas.
- 2) Tujuan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, tepat waktu dan tepat guna.
- 3) Tujuan operasional, dimana pengendalian mengamankan operasi entitas yang dikenal sebagai operasi control.
- 4) Tujuan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway*) (2013) menyatakan tujuan pengendalian internal antara lain sebagai berikut:
 - a) Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
 - 5) Tujuan pelaporan Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai 12 laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
 - 6) Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum hukum

dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan kebijakan entitas itu sendiri. Dari konsep COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway*) pengendalian internal ditunjukkan untuk mencapai tiga kategori utama yaitu tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisien operasi, tujuan pelaporan, tujuan ketaatan yang diharapkan mampu menjaga aset dari perusahaan

d. Komponen Pengendalian Internal

Dalam (Safitri, 2021) menurut COSO (*Committee off Sponsoring Organizations of the Treadway*) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk penerapan suatu perusahaan guna untuk mencapai tujuan pengendalian intern kelima komponen tersebut diantaranya:

- 1) Lingkungan pengendalian ini meliputi suatu sikap dari manajemen dan karyawan perusahaan tentang betapa pentingnya sebuah pengendalian internal dalam sebuah perusahaan (COSO: 2013).
- 2) Penilaian Resiko Berdasarkan rumusan COSO (*Committee of Sponsorig Organizations o the Treadway*), bahwa penilaian resiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian tujuan.
- 3) Aktivitas Pengendalian Menurut (COSO: 2013) aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan yang bersifat personel seperti mutasi tugas, cuti wajib, pelimpahan tanggung jawab, dan pemisahan tanggung jawab, pemisahan pada bagian fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan suatu operasi dari kantor
- 4) Informasi dan Komunikasi COSO (2013) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal dinyatakan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya.
- 5) Pemantauan atau monitoring (COSO: 2013) Pemantauan atau yang sering disebut monitoring ini merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi dengan beberapa bentuk apakah sifatnya berkelanjutan, ataupun terpisah keduanya ini digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip setiap komponen.



Gambar 2. 1 Komponen Pengendalian Internal COSO (Committee off Sponsoring Orgaanizations of the Treadway)

4. Pengendalian Internal atas penerimaan kas

a. Penerimaan Kas

Penerimaan Kas adalah kas yang telah atau sedang diterima oleh suatu perusahaan baik serupa bentuk uang tunai ataupun surat berharga yang mempunyai sifat dapat digunakan, kas dalam suatu perusahaan dapat berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang, atau tamsaksi lainnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2013), mendefinisikan penerimaan kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat disajikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai.

Menurut Mulyadi (2016) dalam (Marizca, 2018) menyatakan bahwa: Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan:

- 1) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check.
- 2) Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.

b. Pengendalian Internal atas penerimaan kas dari Penjualan Tunai

Menurut Mulyadi (2016) dalam (Marizca, 2018) (Aminudin,2020) Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga prosedur yaitu:

- 1) Penerimaan kas dari over-the-counter sale, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over the-counter sale ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi (*personal check*), atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit, sebelum barang diserahkan kepada pembeli.
- 2) Penerimaan kas dari cash-on-delivery sales (*COD sales*) adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan.
- 3) Penerimaan kas dari *credit card sale* adalah salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah suatu prosedur yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari menjual barang dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

5. Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas

a. Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2017) dikutip dari (Aminudin, 2020) dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil adalah:

- 1) Bukti Kas Keluar Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bukti kas keluar diperlukan pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil.
- 2) Cek Cek yaitu dokumen yang memerintahkan bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang bersangkutan dalam dokumen tersebut.
- 3) Permintaan Pengeluaran Kas Kecil Dokumen permintaan pengeluaran kas kecil digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil.
- 4) Bukti Pengeluaran Kas Kecil Dokumen bukti pengeluaran kas kecil dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggung jawabkan dalam pemakaian dana kas kecil.
- 5) Permintaan Pengisian Kembali Kas Kecil Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar membuat bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya untuk dilakukan atas transaksi yang sifatnya untuk kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau karyawan maka dari itu pengendalian internal dibutuhkan supaya uang yang diberikan oleh perusahaan terhindar dari segala bentuk penyelewengan.

6. Pengendalian internal atas Pengeluaran Kas Kecil

Menurut Mulyadi (2016) dalam (Pratiwi, 2018) Sistem pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Pengeluaran Kas kecil di dalam suatu perusahaan sangat sering dilakukan untuk menopang kebutuhan karyawan seperti membeli alat tulis kantor, membayar uang transport, pembelian snack atau makanan untuk klien, dan lain-lain. Dengan demikian pengeluaran dari kas kecil itu akan menjadi sangat besar jika di total dari situ pengeluaran kas kecil harus lebih diperhatikan dengan baik.

7. Pengendalian Internal terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank

Hery (2014), ada beberapa ciri-ciri pengendalian internal (*internal control*) yang baik atas kas dan bank serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank, antara lain:

- a. Dilakukan pemisahan tugas antara bagian keuangan dan bagian akuntansi yang melakukan pencatatan.
- b. Setiap kali penerimaan kas harus segera dicatat. Perusahaan harus mencatat formulir-formulir secara cermat sesuai dengan kebutuhan, dan menggunakannya dengan benar.
- c. Digunakannya imprest fund system untuk mengelola kas kecil.
- d. Uang kas harus disimpan ditempat yang aman, misalnya di brankas, atau di bank.
- e. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar.
- f. Sebaiknya cek dan giro ditulis atas nama dan cek/giro ditandatangani oleh dua orang untuk menghindari penyalahgunaan.

Menggunakan kwitansi yang bernomor urut dan tercetak.

METODOLOGI PENELITIAN

Kategori Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana melalui metode tersebut seorang peneliti akan memperoleh pemahaman terkait realitas sosial (Marwadani, 2020)). Pada penelitian kualitatif, peneliti ingin mengetahui dan memahami fenomena yang akan diteliti. Sifat yang biasa ditonjolkan pada penelitian kualitatif ini yaitu deskriptif dengan menggunakan analisis (Hermawan, 2019). Melalui penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengkajian terhadap perspektif yang bersifat interaktif dan juga fleksibel. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dan dalam penelitian tersebut peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data kualitatif biasanya menggunakan gambar maupun kata-kata yang berasal secara langsung dari sumbernya. Sehingga nantinya hasil penelitian yang telah dianalisis berbentuk penjelasan dan berupa kutipan dari narasumber. Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas di Kementerian Kesehatan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini akan memberikan penjelasan dan juga penggambaran secara mendeskripsikannya secara kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif akan menghasilkan penjelasan yang berbentuk deskripsi untuk menjelaskan frasa dalam bentuk uraian secara tertulis untuk memudahkan pemahaman. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data atau informasi secara langsung dari sumbernya terkait dengan permasalahan atau topik yang dibahas dalam penelitian. Setelah data-data dikumpulkan dan dicari, peneliti akan menginterpretasikan data tersebut dan mengajarkannya secara terurai yang berkaitan dengan pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas di Kementerian Kesehatan.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam sebuah penelitian untuk membantu peneliti dalam menganalisis serta membahas dan mempermudah peneliti dalam menentukan wawancara yang akan dilakukan. Operasionalisasi variabel merupakan pengertian yang didasarkan atas sifat dari masing-masing variabel agar mudah diamati, memiliki rumusan yang jelas serta tidak membingungkan. Melalui operasionalisasi variabel, peneliti dapat menyusun atau membuat alat ukur terkait data dengan tepat dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan atau Kemenkes merupakan salah satu lembaga kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan urusan negara yang berkaitan di bidang kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Awalnya pada tahun 1945 tepatnya pada tanggal 19 Agustus, Kementerian Kesehatan memiliki nama Departemen Kesehatan (Depkes) RI. Depkes ini dibentuk pada awalnya oleh PPKI (Panitia Pesiapan Kemerdekaan Indonesia) bersamaan dengan pembentukan 11

Departemen lain. Pada saat itu, terpilihlah Boentaran Martoatmodjo sebagai Menteri Kesehatan pertama di Indonesia. Boentaran Martoatmodjo ini ditugaskan sebagai dokter di Kantor Inspektorat Semarang dan diterbangkan ke Banjarmasin untuk membantu memberantas penyakit kolera yang ada di Kalimantan. Pada tahun 1931, setelah Boentaran menyelesaikan studinya, ia kembali ke Indonesia lalu bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat (RSCM) pada 1932. Sebagai seorang dokter, Boentaran ini memiliki beragam aktivitas di bidang kesehatan sekaligus tergabung sebagai anggota BPUPKI (Merdeka.com, 2023).

Pasca kemerdekaan, Boentoro ini dipercaya dapat membantu memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara mengubah bentuk departemen menjadi kementerian (Ferizal, 2022). Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjelaskan bahwa pergantian nama tersebut akan membuat anggaran negara menjadi lebih hemat lantaran tugas dan fungsi departemen tidak tumpang tindih dan terbagi ke dalam masing-masing kementerian.



Gambar 4. 1 Logo Kementerian Kesehatan
Sumber: Kemenkes.go.id (2023)

Saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sejak 23 Desember 2020. Sejak Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Menkes ke-20, Budi telah menghasilkan dan memberikan banyak prestasi untuk Kemenkes. Transformasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terus dilakukan oleh Budi untuk membangun relasi yang lebih baik. Budi menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya yaitu untuk membuat masyarakat terjamin dan mendapatkan pelayanan yang layak atau prima.

Tugas Kemenkes dalam hal ini yaitu untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan dimana Kemenkes membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kemenkes juga memiliki beberapa fungsi utama yaitu meliputi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023):

- a. Merumuskan, menetapkan hingga melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan, mencegah dan mengendalikan penyakit yang melanda Indonesia, memberikan pelayanan kesehatan, farmasi, tenaga kesehatan hingga alat kesehatan.
- b. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas, membina, hingga memberi dukungan administrasi kepada unsur organisasi kesehatan.
- c. Mengelola barang milik negara yang telah dibebankan dan menjadi salah satu tanggung jawab Kemenkes.

- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Kemenkes.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis serta supervisi dalam pelaksanaan urusan Kemenkes di daerah.
- f. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan kesehatan.
- g. Memberikan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kemenkes.

2. Visi dan Misi

Setiap perusahaan, organisasi maupun lembaga memiliki visi dan misi sebagai tujuan terbentuknya organisasi tersebut. Kementerian Kesehatan dalam menjalankan segala aktivitasnya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Visi dan misi Kemenkes pada 2020-2024 ini sesuai dengan penjabaran visi dan misi presiden 2020-2024 di bidang kesehatan. Visi dan misi Kemenkes yaitu meliputi:

a. Visi

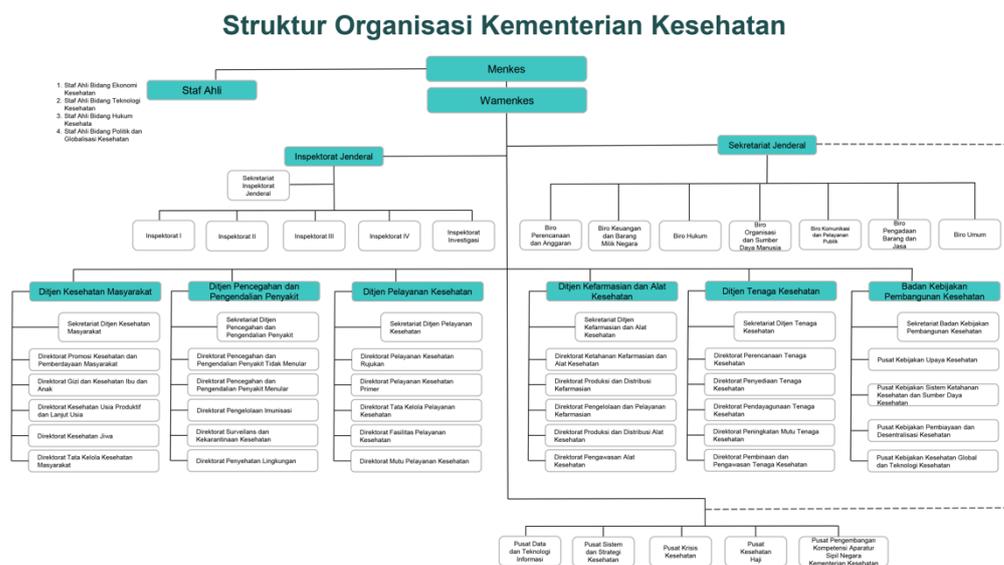
"Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan"

b. Misi

- 1) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- 2) Menurunkan angka stunting pada balita;
- 3) Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- 4) Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

3. Struktur Organisasi

Bagi sebuah perusahaan atau organisasi, dibutuhkan pembentukan struktur organisasi untuk menunjang kesuksesan dan berjalannya program kerja dengan baik. Stuktur organisasi harus tersusun dengan baik dan jelas agar seluruh aspek di dalam organisasi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat. Apabila tidak ada stuktur organisasi dalam sebuah perusahaan, maka tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap orang menjadi tumpang tindih dan mengakibatkan organisasi tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan juga memiliki struktur organisasi di dalamnya. Struktur organisasi tersebut yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
Sumber: Kemenkes.go.id (2023)

Pada struktur organisasi terlampir beberapa jabatan serta tugas-tugas yang tersusun dengan rapi. Setiap jabatan yang diberikan memiliki tanggung jawab serta tugas yang beragam. Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat beberapa tugas dan fungsi dalam struktur tersebut yaitu meliputi:

a. Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan memiliki tanggung jawab utama yaitu mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan kesehatan dalam taraf nasional seperti merumuskan kebijakan kesehatan, implementasi program, pengawasan pelayanan kesehatan, hingga memberikan edukasi dan informasi terkait kesehatan.

b. Wakil Menteri Kesehatan

Wakil Menteri Kesehatan bertugas dalam membantu Menkes mengelola Kementerian Kesehatan terkait kebijakan kesehatan nasional. Wakemenkes juga dapat melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan mengatasi krisis.

c. Staf Ahli

Staf ahli dalam Kemenkes bertugas untuk menyusun kebijakan kepada pejabat tertinggi terkait dengan bidangnya masing-masing, baik bidang ekonomi, teknologi, hukum maupun politik dan globalisasi.

d. Inspektorat Jenderal

Inspektorat jenderal memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa internal terhadap berbagai aspek operasional dan manajerial di Kemenkes. Inspektorat jenderal juga bertugas untuk memastikan tidak adanya kecurangan dan korupsi.

e. Sekretariat Jenderal

Sekretariat jenderal dalam Kemenkes memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan administrasi serta mendukung koordinasi internal. Secara umum, sekretariat jenderal ini mengurus segala hal terkait administrasi kementerian.

f. Biro Perencanaan dan Anggaran

Biro perencanaan dan anggaran memiliki tugas dalam menyusun rencana serta anggaran yang mendukung pelaksanaan program Kemenkes. Penyusunan anggaran merupakan tugas pokok terkait dengan pengalokasian dana.

g. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara di Kemenkes bertugas mengelola aspek keuangan serta asset yang dimiliki kementerian. Tugas biro ini menyusun anggaran, mengelola keuangan, hingga pelaporan keuangan.

h. Biro Hukum

Biro hukum Kemenkes bertugas dalam memastikan kebijakan, program, dan aktivitas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu biro hukum juga menyusun dan memeriksa kebijakan hukum, memberikan konsultasi hukum serta menangani perselisihan hukum.

i. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Biro organisasi dan sumber daya manusia memiliki tanggung jawab dalam manajemen personalia, mengembangkan organisasi dan mengoptimalkan SDM yang ada.

j. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik bertanggung jawab dalam membangun citra positif, memberikan informasi yang akurat, serta menjalin interaksi dengan masyarakat.

- k. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Biro Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab dalam mengelola dan melakukan proses terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Kemenkes.
- l. Biro Umum
Biro umum bertugas dalam mendukung keberlangsungan operasional kementerian seperti manajemen administrasi, logistik, pengawasan, kepegawaian, dan lainnya.
- m. Ditjen Kesehatan Masyarakat
Ditjen kesehatan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sektor kesehatan di tingkat nasional seperti melaksanakan kebijakan kesehatan, penyusunan rencana dan program kesehatan, serta peningkatan kesehatan masyarakat.
- n. Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Ditjen P2P bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia.
- o. Ditjen Pelayanan Kesehatan
Ditjen pelayanan kesehatan memiliki tugas dalam mengelola dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti mengembangkan mengimplementasikan pelayanan kesehatan, memberikan standar dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- p. Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi sektor farmasi serta alat kesehatan. Ditjen ini menetapkan regulasi dan standarisasi produk farmasi dan alat kesehatan, melakukan pengawasan serta distribusi.
- q. Ditjen Tenaga Kesehatan
Ditjen Tenaga Kesehatan bertugas dalam mengelola dan mengawasi berbagai aspek terkait tenaga kesehatan seperti perumusan kebijakan, pengaturan standarisasi, hingga regulasi lisensi.
- r. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan seperti melakukan perencanaan kesehatan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta kerjasama dengan pihak eksternal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas di Kementerian Kesehatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pengendalian Internal atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Pemantauan dan Monitoring
Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan serta monitoring terhadap tim internal dengan membentuk tim khusus Sistem Kepatuhan Internal (SKI) dan Unit Pelayanan Gratifikasi.
 - b. Aktivitas Pengendalian
Adapun upaya pengendalian internal dengan pemisahan tugas bagian keuangan dan akuntabilitas dalam hal pencatatan, pencatatan segera penerimaan dan pengeluaran

kas, penyimpanan uang kas di tempat aman seperti brankas dan bank, pengeluaran kas yang harus mendapatkan otorisasi, penulisan dan penandatanganan giro oleh dua orang, menggunakan kwitansi bernomor urut dan cetak.

c. Penilaian Resiko

Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis risiko, mengklasifikasikan, menetapkan prioritas serta menentukan tindakan pengendalian. Penilaian risiko yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan juga harus mampu meminimalisir potensi kecurangan dengan melakukan pemahaman mendalam dan melakukan mitigasi risiko

d. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu dengan pengawasan struktur organisasi, alur pelaporan, wewenang dan akuntabilitas yang memadai. Hal ini dilakukan untuk membantu membangun lingkungan serta budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan responsive terhadap perubahan.

e. Informasi dan Komunikasi

Kementerian Kesehatan melakukan kegiatan komunikasi dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan media-media modern seperti media social. Komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara internal dan eksternal.

Kementerian Kesehatan sudah cukup baik dan efektif dalam melaksanakan dan menerapkan pengendalian internal pada standar operasional prosedur (SOP) dan telah sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO yaitu pemantauan monitoring, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi.

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas di Kementerian Kesehatan, peneliti memberikan beberapa saran terkait hal tersebut. Saran-saran yang peneliti berikan yaitu meliputi:

1. Sebaiknya Kementerian Kesehatan dapat menjaga dan melestarikan sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran yang sudah ada. Penjagaan tersebut dilakukan dengan cara memantau atau monitoring pelaksanaan penerimaan serta pengeluaran kas dengan baik agar proses yang dilakukan juga berjalan dengan lancar serta efektif.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya apabila ingin mengembangkan hal serupa yang berkaitan dengan pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas di sebuah instansi sebaiknya lebih dirincikan lagi pembahasannya secara detail seperti meliputi proses atau sistem penerimaan kas secara kredit, tunai dan non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. . (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Peran Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*.
- Jannah, S. A. (2017). Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Atas Jasa Sewa Kamar Dan Sewa Meeting Room Pada Hotel Best Skip Palembang. *Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*.
- Fajar, I., & Rusmana, O. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Bri Dengan Coso Framework. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*.

- Kalendesang, A. K., Lambey, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Supermarket Paragon Mart Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 131-139.
- Yuwanita, A., & Ariani, N. E. (2016). Analisis Hubungan Pengendalian Internal Versi Coso Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 199-209.
- Safitri, D. A. (2021). Implementasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Kredit Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Karyamadya Kencana Berdasarkan Kerangka Kerja Coso. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Aminudin, K. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dan Kas Kecil Pada Pt Terminal Teluk Lamong. *Universitas Airlangga*.
- Pratiwi, N. A. (2018). Prosedur Pengeluaran Kas Menggunakan Dana Kas Kecil Pada Rumah Sakit Condong Catur. *Universitas Islam Indonesia*.
- Republik.com (2022) Karyawati PT.Sumber Batu di tangkap atas penggelapan ung perusahaan sebesar 662 juta. *Republik.com*
- Marizca, P. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas atas Penjualan Tunai pada CV Jati Bening Family Palembang. *POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PALEMBANG*
- Anggraeni, N. H., Suarsa, A., & Verawaty, V. (2017). Analisis Pengendalian Intern Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Arus Kas. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*,
- Mahayusa, P. W., Yuniarta, G. A., AK, S., & SINARWATI, N. K. (2017). Evaluasi sistem informasi akuntansi atas prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dana program bantuan operasional sekolah sebagai penyedia informasi pengendalian internal pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Busungbiu Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*,.
- Pradana, K. A., Sulindawati, N. L. G. E., Ak, S. E., & Julianto, I. P. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Koperasi Unit Desa (KUD) Seririt. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*,
- Veronica, D., & Jaya, H. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Dari Piutang Pada Perusahaan Jasa Ekspedisi Di Pt. Trans Mutli Cargo. *Measurement: Journal of the Accounting Study Program*, .
- Claudia, S. S. D., Pontoh, W., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Hotel Gran Puri Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7.
- Amalia, F. A. (2023). *Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ferizal. (2022). *Sejarah Departemen Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dari 1945 – 2021, Serta Ferizal (ASN Promosi Kesehatan Digital*. CV Jejak.
- Istikomah, I. E., & Estiningrum, S. D. (2022). *Pengendalian Internal dalam Sistem Kompensasi*. Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://www.kemkes.go.id/id/home>.
- Merdeka.com. (2023, June 26). *Historia Kementerian Kesehatan Sejak 1945*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/historia-kementerian-kesehatan-sejak-1945-1598-mvk.html?screen=1>.

- Nazara, Y., & Tua, M. J. (2019). Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas di Desa Sllimabanua. *Journal of Information Technology and Accounting* , 2(1), 59–66.
- Rahman, K. G. (2021). *Good Governance dan Pengendalian Internal pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Teori dan Praktek*. EDU Publisher.
- Thian, A. (2021). *Dasar-dasar Auditing, Integrated and Comprehensive Edition*. CV Andi Offset.
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., & Inderawati, R. M. F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. Yain Madura Press.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Widina, I. W., Gading, I. K., Tegeh, I. M., & Antara, P. A. (2020). *Validasi Penyusunan Instrumen Penelitian Pendidikan*. PT Rajagrafindo Persada.